

REVIEW RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2012 – 2017



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG



KATA PENGANTAR

Review Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 merupakan arah dan pedoman bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pembangunan kelautan dan perikanan periode 2012 – 2017 yang disusun secara komprehensif, sehingga program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan dapat terpadu, sinergi, fokus dan responsif terhadap tantangan dan perubahan yang terjadi.

Renstra ini disusun sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa setiap satuan kerja pemerintahan diwajibkan membuat rencana strategis sebagai pedoman kerja setiap satuan kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya, dengan merujuk pada Visi Misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017 dan Visi Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Tahun 2015 - 2019.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi baik melalui usaha pemikiran dan masukan sehingga dokumen Review Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 ini dapat tersusun dengan baik, Dinas Kelautan dan Perikanan menyampaikan terimakasih dan penghargaan. Semoga dokumen Review Rencana Strategis ini dapat bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pangkalpinang, Juli 2015
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

SARJULIANTO, Dipl.SE
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19580710 198603 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
<i>A. Kondisi Umum</i>	<i>1</i>
1. <i>Capaian Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2012-2013.....</i>	<i>1</i>
2. <i>Target Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2012-2014 yang belum tercapai</i>	<i>5</i>
<i>B. Potensi dan Permasalahan.....</i>	<i>8</i>
1. <i>Potensi.....</i>	<i>8</i>
2. <i>Permasalahan.....</i>	<i>12</i>
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	14
<i>A. Visi dan Misi Gubernur Terpilih 2012-2017.....</i>	<i>14</i>
<i>B. Visi Misi Pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan.....</i>	<i>14</i>
B.1. <i>Visi Dinas Kelautan dan Perikanan</i>	<i>15</i>
B.2. <i>Misi Dinas Kelautan dan Perikanan</i>	<i>15</i>
<i>C. Tujuan</i>	<i>16</i>
<i>D. Sasaran Strategis.....</i>	<i>16</i>
 BAB III STRATEGIS KEBIJAKAN DAN PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN.....	 18
<i>A. Strategi Kebijakannan.....</i>	<i>18</i>
<i>B. Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan</i>	<i>19</i>
 BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	 20
<i>A. Target Kinerja.....</i>	<i>20</i>
A.1. <i>Indikator Kinerja Utama (IKU).....</i>	<i>20</i>
A.2. <i>Indikator Kinerja Program.....</i>	<i>21</i>

<i>A.3. Indikator Kinerja Kegiatan.....</i>	<i>21</i>
<i>B. Kerangka Pendanaan.....</i>	<i>21</i>
BAB V PENUTUP	22
LAMPIRAN.....	23

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

1. Capaian Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2012 – 2014

Rencana Strategis (Renstra) DKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012-2017. Di dalam penjelasan mengenai keterkaitan tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang mendukung visi Gubernur terpilih 2012-2017, Dinas Kelautan dan Perikanan mengambil peranan untuk mendukung misi Bapak Gubernur di segala lini, khususnya **Misi 1, yaitu mengembangkan ekonomi kerakyatan**, dengan arah kebijakan berupa fasilitasi pengembangan usaha penangkapan ikan, pembudidaya ikan, pengolahan ikan, pemberdayaan nelayan serta pembudidaya skala kecil se-Babel. Selain Misi 1, Dinas Kelautan dan Perikanan juga mengambil peranan dalam mendukung **Misi 3, yaitu meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan mengendalikan tata ruang**. Arah kebijakan yang ditempuh untuk mewujudkan misi ini berupa Pemanfaatan lahan agar menjadi kawasan produktif dan ekonomis untuk melindungi kerusakan SDA dan Pengkoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan nilai-nilai lokal untuk mencegah dampak negatif lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Adapun misi terakhir yang juga menuntut peran aktif dari Dinas Kelautan dan Perikanan adalah pelaksanaan **Misi 5, yaitu pembangunan infrastruktur wilayah dan mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh** dengan arah kebijakan berupa Pemenuhan energi di pulau-pulau kecil untuk mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan dan pengembangan pariwisata.

Arah kebijakan pengembangan ekonomi kerakyatan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengendalian/penyusunan tata ruang laut menjadi kata kunci dari tugas pokok dinas kelautan dan perikanan dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di dalam implementasinya Dinas Kelautan dan Perikanan telah menyusun rencana strategis untuk mewujudkan arah kebijakan daerah di atas dalam bentuk visi, misi, program kegiatan dan indikator kinerja utama sebagai alat ukur keberhasilan program kegiatan yang telah dilaksanakan nantinya. Pada renstra Dinas Kelautan dan Perikanan beberapa indikator kinerja utama yang dijadikan acuan dalam mengukur keberhasilan tersebut dibagi menjadi 2 fungsi utama, yaitu:

a. Fungsi Ekonomi, yang terdiri atas:

1. Produksi perikanan tangkap dalam satuan ton.
2. Produksi perikanan budidaya dalam satuan ton.
3. Nilai tukar nelayan/pembudidaya ikan dalam satuan indeks.
4. Nilai ekspor hasil perikanan dalam satuan juta US Dollar.
5. Angka konsumsi ikan dalam satuan Kg/Kap/Thn.
6. Jumlah unit pengolahan ikan dalam satuan unit.

b. Fungsi Lingkungan Hidup, yang terdiri atas:

1. Luas kawasan konservasi laut dan perairan dalam satuan Ha.
2. Jumlah pulau pulau kecil yang dikonservasi dalam satuan pulau.

Dalam kurun waktu 2012-2014, sudah ada beberapa target indikator kinerja utama yang telah tercapai target pembangunannya. Dari 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama yang ada, 4 (empat) indikator telah tercapai target pembangunannya seperti:

1. Produksi perikanan tangkap. Pada tahun 2014 realisasi produksi perikanan tangkap sudah mencapai 212.469 Ton melampaui target yang sudah ditentukan di dalam dokumen renstra sebesar 163.000 Ton atau sekitar 130,35%. Kondisi ini dapat tercapai karena kondisi yang kondusif untuk usaha perikanan tangkap yang lestari di perairan Kepulauan Bangka Belitung. Disamping sebagian besar masyarakat pesisir yang ada memang merupakan nelayan penuh ataupun sambilan, peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi serta Kabupaten/Kota juga memiliki andil yang tidak kecil untuk memajukan bidang perikanan tangkap ini. Bantuan kepada kelompok nelayan yang tergabung dalam KUB (Kelompok Usaha Bersama) diberikan dalam bentuk bantuan sarana prasarana perikanan tangkap, bantuan modal usaha dan peningkatan kapasitas nelayan secara perorangan maupun kelompok.

Bantuan prasarana yang diberikan yaitu kapal dengan berbagai ukuran, jaring, bubu, apartemen ikan dan mesin tempel. Untuk bantuan modal usaha Dinas Kelautan dan Perikanan juga telah memfasilitasi mereka dengan bantuan PUMP (Pemberdayaan Usaha Mina Pedesaan) perikanan tangkap, berupa bantuan uang langsung ke rekening kelompok yang sudah mendapat rekomendasi dari DKP Kabupaten/Kota dan verifikasi dari DKP Provinsi. Selain itu dinas juga memberikan pembekalan berupa pengetahuan tentang perizinan usaha, alur pelayaran, cara memperbaiki kapal dan cara menambah modal usaha dengan mendekatkan mereka kepada Bank yang menerbitkan program bantuan dengan bunga rendah.

Pada review renstra ini, indikator kinerja utama berupa produksi perikanan tangkap akan tetap dipertahankan baik dari sisi indikator kinerja maupun target besarnya sampai dengan tahun 2017. Hal ini dirasa baik karena masih tetap dapat menggambarkan kemajuan pembangunan di bidang perikanan tangkap.

2. Angka Konsumsi Ikan perkapita pertahun. Pada tahun 2014, realisasi angka konsumsi ikan perkapita pertahun sudah mencapai 45,87 Kg/Kapita/Tahun berada di atas dari target yang telah ditentukan pada renstra 2012-2017 yaitu sebesar 45 Kg/Kapita/Tahun atau sekitar 101,93%, bahkan nilai ini juga jauh di atas target Nasional yang hanya ditetapkan sebesar 45 Kg/Kapita/Tahun pada tahun 2014. Kondisi ini dapat dipahami karena masyarakat Kepulauan Bangka Belitung memang sudah memiliki kebiasaan yang baik yaitu mengkonsumsi ikan baik dalam bentuk langsung maupun olahan. Angka konsumsi ini juga meningkat karena kegemaran masyarakat Kepulauan Bangka Belitung yang tadinya hanya mau mengkonsumsi ikan laut juga sudah mulai menerima keberadaan ikan air tawar sebagai alternatif menu makanan serba ikan. Kegemaran makan ikan ini terus dikampanyekan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi maupun Kabupaten/Kota melalui kegiatan GEMARIKAN, atau yang lebih akrab didengar Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan.

Kegiatan ini diadakan untuk mengkampanyekan akan pentingnya kita mengkonsumsi ikan kepada anak-anak SD, SMP, SMA dan Mahasiswa. Konsumsi ikan yang cukup diperlukan untuk mengoptimalkan pertumbuhan badan dan fungsi otak manusia, karena Ikan mengandung 18 % protein terdiri dari asam-asam amino esensial yang tidak rusak pada waktu pemasakan. Kandungan lemaknya 1-20 % lemak yang mudah dicerna serta langsung dapat digunakan oleh jaringan tubuh. Kandungan lemaknya sebagian besar adalah asam lemak tak jenuh yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan dapat menurunkan kolesterol darah.

Pada review renstra ini, indikator kinerja utama berupa Angka Konsumsi Ikan perkapita pertahun akan tetap dipertahankan baik dari sisi indikator kinerja maupun target besarnya sampai dengan tahun 2017. Hal ini dirasa baik karena masih tetap dapat menggambarkan kemajuan tingkat konsumsi perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3. Luas Kawasan Konservasi Laut dan Perairan. Pada tahun 2014, realisasi luas kawasan ini sudah mencapai 496.792 Ha dari target yang ditetapkan seluas 2000

Ha (terjadi kesalahan penulisan, seharusnya adalah 200.000 Ha) atau sekitar 248% pada Renstra DKP tahun 2012-2017. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri atas kurang lebih 80 persen perairan dan 20 persen daratan memang sudah dikenal kaya akan kandungan timahnya. Namun seiring waktu sumberdaya ini juga pasti akan berkurang dan tidak cukup lagi untuk menopang kehidupan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung.

Sebagai salah satu sektor alternatif penggerak utama ekonomi Babel yang sudah mulai diperkenalkan pada RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sektor kelautan dan perikanan akan mengambil peran besar dalam menopang kehidupan perekonomian di wilayah ini. Sebagai salah satu langkah yang telah ditempuh oleh pemerintah daerah yang memiliki kewenangan kewilayahan sesuai dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 telah mencadangkan sebagian wilayah lautnya sebagai kawasan konservasi perairan daerah (KKPD) melalui SK Bupati/Walikota.

Pada review renstra ini, indikator kinerja utama berupa Luas Kawasan Konservasi Laut dan Perairan ini akan hanya diperbaiki dari target besarnya sampai dengan tahun 2017 karena terjadi kesalahan input pada saat pencatatan ke RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini dirasa baik karena menggambarkan besarnya kepedulian Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk keberlanjutan pembangunan bidang kelautan dan perikanan.

4. Jumlah Pulau Pulau Kecil yang Dikonservasi. Pada tahun 2014, realisasi jumlah pulau yang dikonservasi ini juga telah melampaui target Renstra DKP sebanyak 11 (sebelas) pulau dari target yang ditentukan sebanyak 8 (delapan) pulau atau sebesar 114,29%. Capaian ini terpenuhi seiring dengan luasnya wilayah yang dicadangkan untuk kawasan konservasi di atas. Pulau pulau ini juga sudah mulai diusahakan sebagai kawasan terpadu pariwisata.

Pada review renstra ini, indikator kinerja utama berupa Jumlah Pulau Pulau Kecil yang Dikonservasi ini diganti dengan Jumlah POKMASWAS yang aktif dalam satuan kelompok. Hal ini untuk mengakomodir pengukuran indikator kinerja bidang pengawasan yang sekarang ini sedang diutamakan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, karena jumlah pulau pulau kecil yang dikonservasi sudah tergambarkan dengan indikator kinerja sebelumnya yaitu Luas Kawasan Konservasi Laut dan Perairan.

2. Target Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2012 – 2014 yang belum Tercapai.

Selain 4 (empat) indikator kinerja yang telah tercapai target pembangunannya di atas, ternyata juga ada 4 (empat) Indikator Kinerja Utama yang belum tercapai target pembangunannya. Namun demikian pencapaian dari tiap-tiap indikator sudah menunjukkan angka yang cukup baik dengan hasil capaian rata-rata 78% di luar angka pencapaian produksi perikanan budidaya yang memang sangat kecil yaitu hanya 8,52% saja dari target yang telah ditetapkan. Keempat indikator tersebut adalah:

1. Produksi Perikanan Budidaya. Pada tahun 2014, realisasi capaian untuk indikator ini memang masih sangat jauh dari target yang diharapkan. Pada tahun 2014, produksi perikanan budidaya hanya mencapai 4.198 Ton dari target sebesar 49.275 Ton atau sebesar 8,52%. Kondisi ini terjadi karena masih rendahnya minat masyarakat untuk melakukan kegiatan budidaya ikan dikarenakan beberapa faktor seperti waktu yang dibutuhkan untuk budidaya masih relatif lama dibandingkan dengan kegiatan perikanan tangkap yang langsung bisa dinikmati hasilnya dalam kurun waktu 1 (satu) hari atau 1 (satu) minggu berikutnya. Untuk budidaya perikanan, waktu yang dibutuhkan rata-rata adalah 8 (delapan) bulan berikutnya. Jenis budidaya yang paling cepat untuk dilaksanakan saja masih memerlukan waktu selama 45 (empat puluh lima) hari untuk budidaya rumput laut.

Selain itu masih adanya rasa trauma dari masyarakat jika terjadi gagal panen. Trauma ini bisa dipahami, karena untuk jenis budidaya air payau seperti budidaya udang, modal yang diperlukan untuk kegiatan ini cukup besar sehingga jika terjadi gagal panen maka pembudidaya mengalami kerugian yang besar. Terlebih lagi kadang terjadi gagal jual walaupun pembudidaya telah melaksanakan panen raya seperti panen rumput laut.

Selain itu, fungsi pemerintah dalam bentuk pembinaan kepada kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN) masih belum optimal. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kabupaten/Kota belum banyak menganggarkan bantuan sarana dan prasarana bidang perikanan budidaya, bantuan benih ikan dan bimbingan teknis serta pendampingan dari penyuluh lapangan. Bantuan-bantuan ini diperlukan untuk pengembangan usaha para pembudidaya. Ke depan, Dinas Kelautan dan Perikanan akan mengoptimalkan bantuan kepada POKDAKAN baik dari sisi bantuan sarana dan prasarana, bantuan benih dan pembinaan serta bantuan modal agar pembudidaya dapat berdaya dan memproduksi dengan baik.

Disamping itu akan diadakan pembenahan dari sisi penyediaan data perikanan budidaya. Dikhawatirkan data yang disajikan oleh petugas dari Kabupaten/Kota belum benar-benar menggambarkan kondisi yang ada di lapangan, dalam arti masih banyak kegiatan budidaya yang belum dilaporkan.

Pada review renstra ini indikator kinerja utama produksi perikanan budidaya dirasionalisasi target angka capaiannya saja, sedangkan indikator kinerja utamanya adalah tetap. Selain itu, pada review renstra ini juga dimunculkan satu indikator kinerja yang baru, yaitu jumlah produksi benih dalam satuan ekor.

2. Nilai Ekspor Hasil Perikanan. Pada tahun 2014, realisasi Nilai ekspor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2014 mencapai kurang lebih 6,5 juta USD dari target yang telah ditetapkan sebesar 13 juta USD atau sebesar 50%. Hal ini dapat dimaklumi karena banyak hasil perikanan tangkap yang berasal dari provinsi ini tidak terdaftar sebagai produk perikanan ekspor Kepulauan Bangka Belitung karena belum optimalnya fungsi LPPMHP (Laboratorium Pengawasan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan) sebagai salah satu institusi yang diharapkan dapat mengeluarkan sertifikat ekspor. Fungsi ini belum tercapai karena LPPMHP belum terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) karena belum terpenuhinya syarat untuk sertifikasi seperti jumlah analis yang memadai, kompetensi yang diperlukan belum mencukupi dan kelengkapan sarana prasarana yang belum dimiliki untuk uji ekspor sehingga data ekspor tergantung dari instansi lain. Dalam hal ini, pengusaha Bangka Belitung lebih mengutamakan perdagangan antar pulau ke Kepulauan Riau ataupun Jakarta yang sudah memiliki izin ekspor, sehingga produk hasil perikanan Bangka Belitung dicatat sebagai produk ekspor provinsi lain.

Langkah-langkah menuju akreditasi sudah dirintis oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa penyediaan sumber daya listrik tahun 2012 sebagai persyaratan utama akreditasi, telah disusun dan disahkan panduan mutu pada tanggal 1 april 2014, telah dilakukan audit internal, telah dilakukan kaji ulang manajemen dan seluruh personil laboratorium telah dilaksanakan pelatihan ISO 17025. rekrutmen dan penambahan pengetahuan analis mutu hasil perikanan dan mempersiapkan uji kompetensi dalam rangka persiapan uji banding dari Komite Akreditasi Nasional (KAN). Dengan telah terbitnya akreditasi dari KAN, diharapkan fungsi LPPMHP akan lebih optimal dalam mendukung pembangunan bidang kelautan dan perikanan untuk peningkatan mutu hasil perikanannya.

Sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kegiatan sertifikasi mutu hasil

perikanan yang sebelumnya dilaksanakan oleh LPPMHP, diserahkan kewenangannya ke Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Pada review renstra ini, indikator kinerja utama Nilai Ekspor Hasil Perikanan dihilangkan, karena proses akreditasi di atas masih memakan waktu yang tidak pendek sehingga dikhawatirkan fungsi ekspor belum bisa didukung optimal oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.

3. Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI). Pada tahun 2014 realisasi jumlah UPI yang dibina oleh Dinas Kelautan dan Perikanan baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota telah mencapai angka 1.872 unit dari target 1.980 unit pengolahan ikan atau sebesar 94,79%. Angka pencapaian ini sudah hampir memenuhi dari jumlah yang ditargetkan walaupun dirasa target yang ditetapkan di dalam Renstra DKP masih terlalu tinggi.

Pada review renstra ini, indikator kinerja utama Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) mengalami perubahan menjadi Volume produk olahan dalam satuan Ton sesuai dengan target indikator yang telah ditetapkan oleh Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Kementerian Kelautan dan Perikanan. Setelah melalui pertimbangan yang lebih matang, maka Dinas Kelautan dan Perikanan berkesimpulan untuk mengganti Indikator ini. Volume produksi produk olahan dianggap lebih merepresentasikan fungsi pembinaan dinas yang berimbas langsung kepada meningkatnya Volume produksi olahan dari UPI-UPI yang ada, sementara jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) pendataannya belum maksimal;

4. Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya Ikan. Pada tahun 2014 realisasi nilai tukar nelayan (NTN) hanya mencapai 102,98 indeks dibandingkan dengan target capaian di dalam renstra yaitu senilai 120 indeks atau sebesar 85,82%. Target untuk indikator kinerja utama ini dirasa cukup tinggi jika dibandingkan dengan target nasional yang hanya sebesar 105 indeks untuk tahun 2014. Namun, secara kenyataan masih tersisa keraguan akan validasi data atas realisasi NTN yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) khusus wilayah provinsi kepulauan seperti Kepulauan Bangka Belitung dikarenakan berbedanya penghitungan berdasarkan metodologi dan data sampel. Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi) masih sangat kecil tingkat pencapaiannya karena perikanan budidaya masih belum menjadi mata pencaharian utama dari masyarakat, baru sebatas mata pencaharian sambilan sehingga indikator untuk Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi) dihilangkan.

Pada review renstra ini, indikator kinerja utama Nilai Tukar Nelayan (NTN) mengalami rasionalisasi dari sisi target capaian untuk tahun 2015-2017 saja. Indikator ini masih tetap diperlukan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan nelayan yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1. Potensi

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan provinsi dengan nomenklatur kepulauan pertama di Indonesia. Provinsi ini berdiri dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2000. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan wilayah maritim dan kepulauan yang memiliki wilayah pesisir dan pulau yang cukup banyak yaitu sebanyak 950 pulau, dengan 470 buah pulau telah diberi nama dan 480 buah pulau belum bernama. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai panjang pantai 1.295,83 Km dengan Luas wilayah sebesar 81.582 km², terdiri dari wilayah daratan 16.281 km² dan perairan laut 65.301 km² atau 4 kali luas dari wilayah daratan, dan diperkirakan 20% diantaranya merupakan perairan karang.

Sebagai Provinsi yang memiliki wilayah maritim dan kepulauan, Bangka Belitung memiliki peran strategis untuk menjadi *prime mover* perekonomian daerah. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang melimpah baik dari segi kuantitas maupun diversitas. Potensi tersebut berupa potensi perikanan tangkap, potensi perikanan budidaya, potensi produk olahan asal ikan, dan potensi keanekaragaman hayati yang terkandung di dalam perairan provinsi ini.

Posisi geostrategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diapit oleh 2 (dua) pulau besar, yaitu Pulau Sumatera dan Pulau Jawa serta berada pada jalur ALKI I juga merupakan potensi besar yang dapat dikelola untuk kesejahteraan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung. Secara institusi sudah tersedia dinas pada setiap Kabupaten/Kota yang ikut membantu menangani pembangunan sektor kelautan dan perikanan ini disamping keberadaan UPT Pusat, seperti PPN Sungailiat, PPN Tanjungpandan, Pusat Karantina Ikan Pangkalpinang dan Satker Pengawas Perikanan Bangka. Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang memiliki latar belakang bidang kelautan dan perikanan pada setiap institusi kelautan dan perikanan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Disamping itu dukungan kebijakan pembangunan bidang kelautan dan perikanan baik dari tingkat Pusat, Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun dari tingkat provinsi, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pengalihan Kewenangan

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa telah dialihkan beberapa kewenangan pengelolaan dan pengawasan sumber daya laut pesisir dan pulau-pulau kecil antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota.

Adapun pengalihan kewenangan tersebut meliputi :

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kab/Kota
1.	Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil	a. Pengelolaan ruang laut di atas 12 mil dan strategis nasional. b. Penerbitan Izin pemanfaatan ruang laut nasional. c. Penerbitan izin pemanfaatan jenis dan genetik (plasma Nutfah) ikan antar negara. d. Penetapan jenis ikan yang dilindungi dan diatur perdagangannya secara internasional. e. Penetapan kawasan konservasi f. Database pesisir dan pulau-pulau kecil.	a. Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil diluar minyak dan gas bumi b. Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi. c. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.	
2.	Perikanan Tangkap	a. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut di atas 12 mil. b. Estimasi stok ikan nasional dan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan (JTB). c. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk : 1) Kapal perikanan berukuran di atas 30 GT; dan 2) Di bawah 30 GT yang menggunakan modal asing dan/atau tenaga asing. d. Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 30 GT. e. Pendaftaran kapal perikanan di atas 30 GT.	a. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sampai dengan 12 mil. b. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT. c. Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi. d. Penerbitan izin pengadaan kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT s.d. 30 GT. e. Pendaftaran kapal perikanan di atas 5	a. Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/ kota b. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan ikan (TPI)

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kab/Kota
			GT s.d. 30 GT.	
3.	Perikanan Budidaya	a. Sertifikasi dan izin edar obat/dan pakan ikan b. Penerbitan izin pemasukan ikan dari luar negeri dan pengeluaran ikan hidup dari wilayah Republik Indonesia c. Penerbitan izin Usaha (IUP) di bidang pembudidayaan ikan lintas Daerah provinsi dan/atau yang menggunakan tenaga kerja asing.	Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	a. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota b. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan c. Pengelolaan pembudidaya ikan
4.	Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan	Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di atas 12 mil, strategis nasional dan ruang laut tertentu.	Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil	-
5.	Pengolahan dan Pemasaran	a. Standardisasi dan sertifikasi pengolahan hasil perikanan b. Penerbitan izin pemasukan hasil perikanan konsumsi dan nonkonsumsi ke dalam wilayah Republik Indonesia c. Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah provinsi dan lintas negara	Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi	-
6.	Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Penyelenggaraan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.	-	-
7.	Pengembangan SDM Masyarakat Kelautan dan Perikanan	a. Penyelenggaraan penyuluh perikanan nasional b. Akreditasi dan sertifikasi penyuluh perikanan c. Peningkatan kapasitas SDM masyarakat kelautan dan perikanan.	-	-

Jika memiliki pengalihan pengaturan kewenangan diatas, maka ada perluasan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi. Hal ini merupakan potensi yang harus dengan bijak dikelola oleh Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Permasalahan

Seiring dengan posisi strategisnya di jalur ALKI I dan potensi perikanan tangkap, budidaya, pengolahan dan keanekaragaman hayati yang besar di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, provinsi ini juga mengalami berbagai bentuk permasalahan yang harus dicarikan solusinya secara arif dan berimbang dengan tetap mempertimbangkan kepentingan nasional dan daerah. Beberapa bentuk permasalahan yang harus dijawab yaitu:

- a) Maraknya kegiatan penangkapan ikan secara liar (*illegal fishing*) oleh kapal-kapal ikan asing yang merugikan kepentingan nasional Indonesia, serta mengancam kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan. Kegiatan perikanan liar masih akan menjadi ancaman serius bagi pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia di masa mendatang bila Pemerintah tidak segera mengambil langkah-langkah kebijakan pengawasan dan penegakan hukum secara efektif. Tidak luput dari itu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga mengalami hal yang sama dengan maraknya pencurian ikan oleh nelayan asing seperti dari Thailand dan Vietnam. Belum lagi alat tangkap yang digunakan sering kali adalah alat tangkap yang dilarang seperti penggunaan jaring *trawl* dan bom ikan.
- b) Dalam pengembangan perikanan budidaya, masih dihadapkan pada permasalahan implementasi kebijakan tata ruang dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, terbatasnya prasarana saluran irigasi, terbatasnya ketersediaan dan distribusi induk dan benih unggul serta permasalahan bahan baku pakan dan kestabilan harga. Disamping itu serangan hama dan penyakit ikan/udang, serta adanya pencemaran yang mempengaruhi kualitas lingkungan perikanan budidaya.
- c) Dalam rangka pengembangan usaha dan pemasaran produk hasil olahan, permasalahan utama yang dihadapi adalah masih adanya keterbatasan dukungan permodalan usaha dari pihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya kepada para nelayan/pembudidaya/pengolah ikan. Dalam kaitan ini, nelayan/pembudidaya/pengolah ikan masih mengalami kesulitan mengakses dana bantuan permodalan atau kredit akibat terkendala oleh pemenuhan persyaratan prosedural perbankan. Indonesia juga masih menghadapi beberapa kondisi yang belum sepenuhnya dapat mendukung untuk memenuhi persyaratan mutu produk ekspor hasil perikanan yang semakin ketat dari negara-negara mitra dagang, terutama seperti Uni Eropa, China, Rusia, Canada, Korea Selatan, Vietnam dan

- Norwegia. Disamping itu, aspek sangat mendasar yang mempengaruhi lemahnya daya saing dan produktivitas adalah kualitas SDM dan kelembagaannya.
- d) Belum terpetakan dengan baiknya pengelolaan zonasi yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, dimana dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil belum terealisasi. Rencana zonasi ini diperlukan untuk meminimalisir potensi konflik yang mungkin terjadi antar pemangku kepentingan di laut, seperti sektor kelautan dan perikanan, sektor pertambangan, sektor perhubungan laut dan sektor pariwisata. Terlebih lagi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Di dalam Undang-Undang ini sektor kelautan termasuk ke dalam urusan pemerintah daerah yang banyak dialihkan kewenangannya dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi.
 - e) Diatas semuanya itu Kesejahteraan pelaku usaha perikanan (budidaya, penangkapan, pengolahan dan pemasaran) merupakan pokok permasalahan yang harus diselesaikan secara baik dan terintegrasi. Seluruh komponen visi, misi dan program kegiatan ditujukan untuk menjawab permasalahan yang terakhir ini.

Pengalihan Kewenangan

Seperti halnya perluasan kewenangan yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, ternyata dalam implementasinya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mengidentifikasi beberapa permasalahan mengenai personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D) terkait pengalihan kewenangan tersebut yaitu :

a. Personil :

Jumlah sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbatas, sebagai contoh jumlah SDM yang menangani pengelolaan penangkapan ikan dan petugas yang menangani pendaftaran kapal terbatas, dimana untuk perijinan kapal diatas 5 GT s/d 10 GT sangat banyak terutama nelayan yang berdomisili usahanya di pulau-pulau maka akan terjadi kesulitan untuk mendapatkan ijin di provinsi

b. Pendanaan :

Sumber pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik yang bersumber dari dana APBD maupun APBN belum bisa mengcover semua kegiatan pengalihan kewenangan sesuai Undang-Undang No. 23 tahun 2014.

c. Sarana dan Prasarana :

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih terbatas, sebagai contoh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baru memiliki 1 (satu) kapal pengawas (kapal Setuhuk) untuk kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selain itu masih terbatasnya kendaraan operasional untuk pelaksanaan Cek Fisik ke daerah-daerah pesisir/pelabuhan di kabupaten/kota.

d. Dokumen :

Dokumen Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait pelimpahan kewenangan tersebut masih terbatas.

Baik potensi maupun permasalahan yang sudah disampaikan, harus dicari jalan keluar ataupun alternatif kebijakan yang dapat memberikan manfaat optimal untuk seluruh pemangku kepentingan yang terkait. Rumusan kebijakan tersebut disampaikan pada pembahasan bab II mengenai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. VISI dan MISI GUBERNUR TERPILIH 2012-2017

Visi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan RPJMD 2012-2017 adalah :

“Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Yang Aman, Damai, Sejahtera, Adil, Demokratis dan Berdaya Saing Global Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Upaya yang ditempuh untuk mewujudkan visi ini melalui 13 (tiga belas) prioritas program dan kegiatan yang diperlukan, yaitu :

1. Pengembangan *one village one product* (ovop) dan koperasi komoditi;
2. Penguatan *rural urban linkages*;
3. Peningkatan pendidikan wajib belajar 12 tahun.
4. Peningkatan pelayanan kesehatan;
5. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan;
6. Pengembangan infrastruktur konektivitas antar wilayah;
7. Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil;
8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
9. Rehabilitasi lahan kritis dan lahan bekas tambang;
10. Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata;
11. Pengendalian pemanfaatan ruang;
12. Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur; dan
13. Program satam emas.

B. VISI MISI PEMBANGUNAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dinas Kelautan dan Perikanan bertanggung jawab untuk membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai bagian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan berkontribusi dan berkomitmen untuk mewujudkan visi, misi, dan agenda pembangunan daerah, dan

menjalankan program daerah yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012-2017.

B.1. Visi Dinas Kelautan dan Perikanan

Sebelum review renstra untuk tahun 2015-2017, Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah:

“Terwujudnya Industri Kelautan dan Perikanan Berbasis Ekonomi Kerakyatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017.”

Namun, seiring dengan terpilihnya Presiden Republik Indonesia yang baru periode 2015-2019, maka juga terjadi perubahan pada dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dokumen RPJMD ini mengacu kepada dokumen RPJMN yang telah disusun oleh Pemerintah Pusat. Visi dan misi Presiden terpilih tergambarkan di dalam RPJMN 2015-2019 dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga akan menyesuaikan di dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerahnya. Sebagai salah satu SKPD yang berada di bawah kendali Bapak Gubernur, maka Dinas Kelautan dan Perikanan merevisi visinya:

menjadi

“Mewujudkan kedaulatan dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan berbasis ekonomi kerakyatan”

B.2. Misi Dinas Kelautan dan Perikanan

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Perumusan misi mengacu kepada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada DKP. Sebelumnya Misi Dinas Kelautan dan Perikanan yang mengacu kepada visi awal ada 7 Misi, yaitu:

- 1) *Meningkatkan Kualitas SDM Kelautan dan Perikanan*
- 2) *Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap yang Lestari dan Bertanggung jawab*
- 3) *Meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya*
- 4) *Meningkatkan Industri produk olahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang berdaya saing*

- 5) *Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan*
- 6) *Mengelola dan Memberdayakan Potensi Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*
- 7) *Mengelola dan Mengembangkan Industri Jasa Kelautan.*

Setelah adanya perbaikan visi Dinas Kelautan dan Perikanan, maka Misi Dinas Kelautan dan Perikanan juga lebih disederhanakan dengan tetap mengacu kepada visi dinas yang baru, menjadi:

1. *Mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Provinsi kepulauan.*
2. *Mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan*
3. *Mewujudkan kualitas hidup masyarakat kelautan dan perikanan yang tinggi, maju dan sejahtera, serta berkepribadian dalam kebudayaan berbasis Ekonomi Kerakyatan.*

C. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Gubernur terpilih. Oleh karena itu, tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
2. Mewujudkan Kelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

D. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan 2015-2017 sebagai penjabaran Visi Misi DKP ditetapkan sebagai berikut:

- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan dan kinerja aparatur KP dengan sasaran adalah meningkatnya pendapatan dan taraf hidup masyarakat kelautan dan Perikanan serta kompetensi SDM aparatur KP

- Meningkatnya produksi perikanan tangkap dengan sasaran adalah peningkatan hasil tangkapan dalam setiap upaya tangkap dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
- Meningkatnya produksi perikanan budidaya dengan sasaran adalah peningkatan produksi perikanan budidaya baik dalam volume maupun nilai ikan hasil budidaya
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi produk olahan perikanan dan peningkatan pemasaran hasil perikanan dengan sasaran adalah peningkatan volume dan nilai ekspor serta volume produk olahan perikanan
- Meningkatnya ketaatan dan ketertiban dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang lestari dan berkelanjutan dengan sasaran adalah peningkatan persentase wilayah pengelolaan perikanan yang bebas *illegal fishing, Unreported & Unregulated (IUU) fishing*
- Meningkatnya pengelolaan dan pemberdayaan potensi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dengan sasaran adalah peningkatan pemanfaatan potensi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil secara optimal dan lestari

BAB III

STRATEGI KEBIJAKAN DAN PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

A. STRATEGI KEBIJAKAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana dirumuskan diatas, maka beberapa strategi kebijakan yang perlu diambil untuk mensukseskan visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan dirumuskan sebagai berikut :

- Pembinaan, pengembangan dan peningkatan keterampilan serta ilmu pengetahuan bagi masyarakat KP dan aparatur KP, strategi yang dilakukan berupa :
 1. Pelatihan dan Penyuluhan bagi nelayan, pembudidaya ikan dan usaha perikanan skala kecil
 2. Pendidikan, pelatihan dan pengadaan sarana prasarana penunjang kinerja aparatur KP
 3. Penelitian dan pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan
- Pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana perikanan tangkap, strategi yang dilakukan berupa :
 1. Pembinaan dan Pengembangan kapal perikanan, alat tangkap ramah lingkungan, pengawakan perikanan
 2. Pengembangan, Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan
 3. Pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan skala kecil
- Pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana perikanan budidaya, strategi yang dilakukan berupa :
 1. Pembinaan dan pengembangan sistem produksi pembudidayaan ikan
 2. Pembinaan dan pengembangan sistem perbenihan ikan
 3. Pembinaan dan pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan pembudidayaan ikan
 4. Pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan
- Pengembangan dan peningkatan kuantitas dan kualitas produk perikanan serta pemasaran hasil perikanan, strategi yang dilakukan berupa :
 1. Fasilitasi pengembangan industri pengolahan hasil perikanan skala kecil
 2. Peningkatan dan pengembangan mutu hasil produksi perikanan
 3. Fasilitasi penguatan dan pengembangan pemasaran hasil produk perikanan
 4. Fasilitasi pembinaan dan pengembangan sistem usaha dan investasi perikanan

- Pengembangan sistem pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, strategi yang dilakukan berupa :
 1. Pengelolaan dan pengembangan konservasi kawasan dan jenis
 2. Penataan ruang dan perencanaan pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil

B. **PROGRAM PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kelautan dan perikanan akan diimplementasikan melalui program dan kegiatan, yang sesuai dengan tugas dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam dokumen Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan 2012-2017 sebelumnya belum tergambar secara lugas akan peran dan fungsi penting dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kelautan dan Perikanan, seperti Balai Benih Ikan Sentral (BBIS), Balai Benih Ikan Air Payau (BBIAP), Balai Benih Ikan Laut (BBIL) dan Laboratorium Pengujian dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP). Oleh sebab itu di dalam program kegiatan yang telah diperbaharui ini, masuk kalimat Pengujian dan Pengendalian Mutu pada program kegiatan ke-4, untuk mengakomodir fungsi LPPMHP, sedangkan fungsi Balai Benih telah tergambar dengan program kegiatan ke-3. Secara lengkap program kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi:

1. *Dukungan Manajemen dan Teknis Kelautan dan Perikanan*
2. *Pengembangan Perikanan Tangkap*
3. *Pengembangan Perikanan Budidaya*
4. *Pengembangan Pengolahan, Pemasaran, Pengujian dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan*
5. *Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Serta Sumber Daya Perikanan*

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA

A.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai takaran akan berhasil atau belumnya pelaksanaan program kegiatan dan pembinaan kepada masyarakat kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Seiring dengan bergesernya visi, misi dan program kegiatan, maka juga terjadi pergeseran pada IKU Dinas Kelautan dan Perikanan pada review renstra dinas ini. Sebelumnya IKU Dinas 2012-2017 tergambar pada tabel di bawah ini :

NO.	RINCIAN	TARGET		
		2015	2016	2017
A. FUNGSI EKONOMI				
1	Produksi Perikanan (ton)			
	Perikanan Tangkap	169.000	175.000	181.000
	Perikanan Budidaya	56.000	62.000	69.000
2	Nilai Ekspor Hasil Perikanan (USD Juta)	17,37	21,56	24,12
3	Konsumsi Ikan (kg/kap/th)	47	48	49
4	Jumlah Unit Pengolahan Ikan (Unit)	2.200	2.500	2.800
5	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	122	125	127
B. FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP				
6	Luas Kawasan Konservasi Laut dan Perairan (Ha)	450.000	500.000	550.000
7	Jumlah Pulau-pulau Kecil yang dikonservasi (pulau)	10	12	12

Setelah mengalami pergeseran, maka IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2015 - 2017 menjadi:

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET			KET
		2015	2016	2017	
A.	Fungsi Ekonomi				
1.	Peningkatan produksi Perikanan Tangkap (ton)	169.000	175.000	181.000	Tetap
2.	Peningkatan produksi Perikanan Budidaya (Ton)	11.175	13.765	17.080	Rasionalisasi Target
3.	Jumlah Produksi Benih (Ekor)	25.000.000	31.000.000	50.000.000	Baru
4.	Nilai Konsumsi Ikan (Kg/Kap/th)	47	48	49	Tetap
5.	Volume Produksi Olahan (Ton)	19.000	21.000	24.000	Baru

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET			KET
		2015	2016	2017	
6.	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	107	109	111	Rasionalisasi Target
B.	Fungsi Lingkungan Hidup				
1.	Luas Kawasan Konservasi Laut dan Perairan (Ha)	450.000	500.000	550.000	Tetap
2.	jumlah Pokmaswas Aktif (Kelompok)	22	30	35	Baru

A.2. Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Dalam kaitan ini, DKP telah menetapkan Indikator Kinerja Program dalam Struktur Manajemen Kinerja yang merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit kerja setingkat eselon III atau Sekretariat/Bidang pada Dinas Kelautan dan Perikanan. sebagaimana lampiran.

A.3. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*). Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja di DKP merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi setingkat Eselon IV atau Seksi/Subbag pada Dinas Kelautan dan Perikanan. sebagaimana lampiran.

B. KERANGKA PENDANAAN

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan kelautan dan perikanan, serta mencapai target sasaran utama sebagaimana disebutkan dalam Bab terdahulu, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan akan bersumber dari pemerintah (APBN dan APBD), swasta, dan masyarakat. Pendanaan APBN dan APBD hanya bersifat stimulus dan difokuskan pada beberapa kegiatan pokok yang menjadi kewenangan daerah.

Matriks kinerja dan kerangka pendanaan sebagaimana Lampiran.

BAB V

PENUTUP

Review Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 2015-2017 ini merupakan dokumen yang disusun untuk menjabarkan mengukur tingkat keberhasilan 2 (dua) tahun kebelakang, yaitu tahun 2013-2014 dan merancang ulang sesuai kebutuhan dan arah kebijakan baru atas tantangan dan target pembangunan yang telah ditetapkan untuk 3 (tiga) tahun ke depan, yaitu tahun 2015-2017. Dengan adanya review renstra ini diharapkan performa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan menjadi lebih baik dan target-target pembangunan yang telah ditetapkan ditiap level indikator, baik Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dapat terpenuhi dengan baik.

TARGET PEMBANGUNAN TAHUN 2012-2017
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEP. BABEL									
SEKRETARIAT									
PROGRAM									
1.	Program Dukungan Manajemen dan Teknis Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dinas	Persentase Tercapainya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Lingkup DKP	100%	100%	100%	100%	100%	100%
KEGIATAN									
A.	Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan Monev Pembangunan Kelautan dan Perikanan								
SUB KEGIATAN									
a.	Penyiapan Dokumen Perencanaan	Perencanaan yang terintegrasi, akuntabel, dan tepat waktu.	Dokumen perencanaan jangka menengah, panjang dan program kerja jangka pendek yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
a.									
b.	Pelaporan kegiatan	Pelaporan hasil kegiatan yang terintegrasi, akuntabel, dan tepat waktu.	Dokumen pelaporan hasil kegiatan yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
c.	Monev Pembangunan Kelautan dan Perikanan	Pengendalian dan Evaluasi kegiatan-kegiatan pembangunan KP yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	Dokumen Pengendalian dan Evaluasi kegiatan-kegiatan pembangunan KP yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
d.	Penunjang kegiatan Koordinasi Lainnya	Pencapaian standar pelayanan prima dalam bidang koordinasi kegiatan KP	Persentase Pencapaian standar pelayanan prima dalam bidang koordinasi kegiatan KP	65%	75%	80%	85%	90%	90%
KEGIATAN									
B.	Pembinaan Pelaksanaan dan Koordinasi Pengelolaan Keuangan								
SUB KEGIATAN									
a.	Peningkatan pengetahuan dan kemampuan serta pemahaman SDM di bidang pengelolaan keuangan daerah maupun Negara	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan serta pemahaman SDM di bidang pengelolaan keuangan	Persentase peningkatan kualitas kerja SDM dan administrasi pengelolaan keuangan yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu.	85%	90%	95%	98%	100%	100%
b.	Penyelenggaraan akuntansi pelaksanaan anggaran dan pembukuan	Pelaporan akuntansi pelaksanaan anggaran dan pembukuan yang baik, benar, akurat serta tepat waktu	Dokumen pelaporan akuntansi yang baik, benar, akurat serta tepat waktu	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEP. BABEL									
c.	Penyusunan Pertanggung jawaban keuangan	Pelaporan pertanggung jawaban keuangan dengan baik, benar dan tepat waktu sesuai dengan prosedur dan standar pifata usahaan (Laporan Keuangan dengan Predikat WTP)	Dokumen Pelaporan pertanggung jawaban keuangan dengan baik, benar dan tepat waktu sesuai dengan prosedur dan standar penata usahaan keuangan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
d.	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	terlaksananya jasa Administrasi Keuangan dan honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Tim Pengadaan barang dan jasa serta Pemeriksa Barang	lancarnya jasa Administrasi Keuangan dan honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Tim Pengadaan barang dan jasa serta Pemeriksa Barang				12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
KEGIATAN									
C.	Pengelolaan Kepegawaian dan Barang DKP	Terciptanya kelancaran kerja	Meningkatnya kualitas kerja	75%	80%	85%	90%	95%	100%
SUB KEGIATAN									
a.	Penyediaan jasa Surat Menyurat	tersedianya benda benda pos dan jasa pengiriman surat	Lancarnya pelaksanaan Pengiriman Pos	75%	80%	85%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
b.	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Tambah Daya Listrik PLN, Langganan Internet	Lancarnya jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Tambah Daya Listrik PLN, Langganan Internet	75%	80%	85%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
c.	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya peralatan kebersihan, Honor Petugas Cleaning Service dan Satpam	lancarnya Penyediaan jasa Kebersihan Kantor				12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
d.	Perbaikan Perbaikan Peralatan Kerja	Terlaksananya jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Lancarnya jasa Perbaikan peralatan Kerja				12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
e.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Lancarnya Penyediaan alat tulis Kantor				12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
f.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan dan penjilidan	Lancarnya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
g.	Penyediaan komponen Instansi Listrik/Penerangan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Lancarnya Penyediaan Kompenen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
h.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan bagi Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
i.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman pegawai dan tamu	Lancarnya Penyediaan Makanan dan Minuman				12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
j.	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tertaksananya Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Lancarnya pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah				12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET						
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEP. BABEL										
k.	Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Tertaksananya Pembayaran Honor THL Provinsi	Lancarnya Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran				12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
l.	Pengadaan Peralatan dan Pertengkapan gedung kantor	Tersedianya Pertengkapan Gedung Kantor	Lancarnya Pengadaan Peralatan dan Pertengkapan kantor				12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
m.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya jasa Pemeliharaan dan Rehab Gedung Kantor	Lancarnya Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung Kantor				1 Paket	1 Paket	1 Paket	
n.	Penyediaan jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor	Lancarnya Pemeliharaan rutin/Berkala kendaraan Dinas/ Operasional				12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
o.	Pengelolaan Kepegawaian dan Barang DKP	Tertib Administrasi dan terdatanya Aset	Terdatanya Aset Sebagai Penunjang Kinerja Aparatur				1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
p.	Penunjang Pelaksanaan kegiatan Fungsional dan Diklat Fungsional	Kegiatan Fungsional yang lebih baik serta Terdiklatnya PNS yang memiliki Jabatan Fungsional Perikanan di DKP Provinsi Kep. Babel	Meningkatnya Kualitas SDM Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan di Prov. Kep. Babel					1 Paket	1 Paket	
BIDANG PERIKANAN TANGKAP										
PROGRAM										
2.	Pengembangan Perikanan Tangkap	Meningkatnya Produktivitas Perikanan Tangkap dan Kehidupan Nelayan	1) Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton) 2) Jumlah Pendapatan Nelayan: \$ Pendapatan Nelayan Pemilik /Bulan (Rp.) \$ Pendapatan Nelayan Buruh /Bulan (Rp.)	159.000 3.361.721 1.710.697	161.000 3.687.043 1.877.558	163.000 4.045.686 2.062.136	169.000 4.450.255 2.268.349	175.000 4.895.280 2.495.184	181.000 5.384.808 2.744.703	
KEGIATAN										
A.	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	Meningkatnya wilayah pengelolaan perikanan yang terjamin ketersediaan sumber daya ikan dengan data dan pengelolaan pemanfaatan yang terintegrasi, akuratbel dan tepat waktu								
SUB KEGIATAN										
a.	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	Meningkatnya wilayah pengelolaan perikanan yang terjamin ketersediaan sumber daya ikan dengan data dan pengelolaan pemanfaatan yang terintegrasi, akuratbel dan tepat waktu	1) Jumlah lokasi pemantauan dan evaluasi perlindungan dan pengkayaan SDI (Kab/Kota) 2) Jumlah Ekosistem PUD yang teridentifikasi (pulau) 3) Jumlah perairan teritorial dan kepulauan yang teridentifikasi sumber dayanya (pulau)	2	2	1			1	
b.	Pengembangan Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan	Terwujudnya kapal perikanan di Provinsi Bangka Belitung yg laik laut, laik tangkap, laik simpan dan Alat penangkap ikan yang sesuai SNI	1) Jumlah jenis kapal penangkap ikan yang laik laut, laik tangkap dan laik simpan (Unit) 2) Jumlah alat penangkap ikan yang memenuhi standar (unit)	5 500	10 1000	9 900	700		7 700	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEP. BABEL									
c.	Pembinaan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan	Meningkatnya wilayah pengelolaan perikanan yang terjamin ketersediaan sumber daya ikan dengan data dan pengelolaan pemanfaatan yang terintegrasi, akurat, dan tepat waktu	1) Pengelolaan Data Statistik Perikanan Tangkap Provinsi				1	1	1
			2) Pelaksanaan Forum Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap Tingkat Provinsi				1	1	1
			3) Pengadaan Kendaraan Operasional Pengelolaan dan Pemantauan SDI					1	1
KEGIATAN									
B.	Produksi Penangkapan dan Perizinan								
SUB KEGIATAN									
a.	Peningkatan Kesejahteraan Nelayan	Meningkatnya jumlah sertifikat tanah dan keselamatan berlayar bagi nelayan	1) Tanah nelayan tersertifikasi		400 sertifikat	400 sertifikat	400 sertifikat	400 sertifikat	400 sertifikat
			2) Nelayan aman dalam berlayar		350 buah	350 buah	Dihilangkan		
b.	Peningkatan pelayanan perizinan	Pelayanan prima perizinan dalam data kapal, sosialisasi peraturan perikanan dan perizinan ber SOP	1) Nelayan pemilik kapal memiliki Buku kapal Perikanan		50 buku	50 buku	Dihilangkan		
			2) Terfahaminya aturan perikanan di kalangan nelayan		50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang
			3) Terlaksananya perizinan sesuai prosedur		100 buku	100 buku	Dihilangkan		
c.	Dukungan Pelayanan perizinaan kapal perikanan ukuran 30 - 60 GT	Tersedianya Sarana Penerbitan Perizinan yang ONLINE antara KKP JAKARTA dengan DKP PROV.BABEL	Terealisasinya kewenangan proses perizinan di tingkat Provinsi untuk kapal >30-60 GT		1 Pkt				
d.	Peningkatan SDM nelayan	Meningkatnya SDM Nelayan dalam segi sertifikat kepelautan dan keahlian di bidang penangkapan dan pemresinan	1) Kapal perikanan diawaki oleh perwira kapal yang bersertifikat		25 orang & sertifikat	25 orang & sertifikat			25 orang & sertifikat
			2) Nelayan mampu mengembangkan dan mengaplikasikan teknologi penangkapan		25 orang & sertifikat	25 orang & sertifikat			25 orang & sertifikat
			3) Nelayan mampu memperbaiki kerusakan mesin kapal		25 orang & sertifikat	25 orang & sertifikat			25 orang & sertifikat
e.	Pembekalan keselamatan pelayaran nelayan, jalur-jalur penangkapan dan lampu-lampu navigasi	Meningkatnya keselamatan dan pemahaman tentang aturan keselamatan pelayaran	Nelayan memahami prosedur dan aturan keselamatan berlayar		210 orang	210 orang	Dihilangkan		
f.	Diklat cek fisik kapal tingkat Provinsi	Meningkatnya kemampuan cek fisik kapal dan keamanan petugas saat melaksanakan pengukuran kapal	Petugas DKP Kab/Kota bisa melaksanakan tugas pengukuran kapal < 10 GT		20 orang	20 orang			20 orang

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEP. BABEL									
			Persentase menurunnya tingkat kecelakaan petugas pengukuran kapal di atas kapal		80%	85%	Dihilangkan		
KEGIATAN									
C.	Usaha dan Prasarana								
SUB KEGIATAN									
a.	Peningkatan kualitas SDM Perikanan Tangkap	Meningkatkan Kualitas SDM dan Pengembangan Sistem Informasi Pelabuhan Perikanan dan Kelayangagan	Jumlah PPI yang Operasional dan pelayanan prima di Pelabuhan Perikanan		1	1	1	1	2
			Jumlah PPI yang meningkat dalam rangka pelayanan kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan		1	1	1	1	1
			Jumlah PPI yang dievaluasi dan keakuratan data Pelabuhan Perikanan		1	1	1	2	2
			Jumlah Pengembangan KUB Perikanan Tangkap yang mandiri dan bankable		3	5	9	12	14
			Jumlah Lokasi Forum KUB Perikanan Tangkap yang Mandiri dan Bankable		1	2	1	1	1
			Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan Pasca Panen melalui Diversifikasi Usaha Wanita Nelayan				1	2	3
			Verifikasi Permintaan Bantuan KUB Perikanan Tangkap dan Peningkatan Kualitas SDM Bidang Perikanan Tangkap				1	1	1
			Jumlah Peralatan PPI dan Alat Tangkap Ikan yang sesuai SNI (Paket)		3	3			1
			Bimtek Pembuatan dan Perawatan Kapal Fiber					1	1
			Asistensi Penyusunan DED PPI di kabupaten / Kota (lokasi)		1	2	Dihilangkan		
			BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA						
PROGRAM									
3.	Pengembangan Perikanan Budidaya								
KEGIATAN									
A.	Produksi dan Pengendalian Budidaya Ikan								

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEP. BABEL									
SUB KEGIATAN									
a.	Pengembangan sistem produksi pembudidayaan ikan	Meningkatnya produksi perikanan budidaya dengan mutu terjamin dan data akurat	1) Jumlah produksi perikanan budidaya air tawar (Ton)	2.545	4.073	7.740	5.220	7.150	9.010
			2) Jumlah produksi perikanan budidaya air payau (Ton)	1.044	1.870	3.383	1.280	1.500	1.760
			3) Jumlah produksi perikanan budidaya air laut (Ton)	2.260	4.290	9.450	4.675	5.115	6.310
				5.849	10.233	20.573	11.175	13.765	17.080
b.	Pengembangan sistem usaha pembudidayaan ikan	Kawasan potensial perikanan budidaya menjadi kawasan minapolitan dengan usaha yang bankabel	1) Jumlah kelompok usaha perikanan budidaya yang memenuhi standar kelembagaan	7 kelompok	14 kelompok	21 kelompok	28 kelompok	35 kelompok	42 kelompok
			2) Jumlah usaha perikanan budidaya yang memperoleh SNI serta jumlah lembaga sertifikasi yang terakreditasi	21 unit usaha	28 unit usaha	35 unit usaha	42 unit usaha	49 unit usaha	56 unit usaha
			3) Jumlah analisis dan publikasi data statistik perikanan budidaya				2 Laporan	3 Laporan	3 Laporan
			4) Jumlah Diseminasi teknologi terapan bidang sistem produksi				7 Paket	7 Paket	7 Paket
			5) Jumlah pembudidaya yang memperoleh akses permodalan melalui fasilitasi				10 orang	15 orang	20 orang
			6) Jumlah unit usaha budidaya yang memperoleh layanan perizinan				1 Unit	4 Unit	8 Unit
			7) Jumlah paket informasi dan promosi usaha perikanan budidaya				1 Paket	1 Paket	1 Paket
KEGIATAN									
B.	Pembudidayaan, Pembenihan dan kesehatan								
SUB KEGIATAN									
a.	Pengembangan Sistem Pembenihan	Terpenuhinya kebutuhan benih yang bermutu untuk produksi dan terwujudnya sertifikasi CPiB untuk pembenih ikan	1) Jumlah produksi calon induk/induk unggul	10 rb ekor	20 rb ekor	30 rb ekor	50 rbu ekor	100 rbu ekor	150 rbu ekor
			2) Jumlah produksi benih bermutu yang tersedia	2,6 jt ekor	5,2 jt ekor	10,4 jt ekor	25 jt ekor	31 jt ekor	50 jt ekor
			3) Jumlah unit pembenihan yang bersertifikasi CPiB	3 unit	10 unit	17 unit	3 unit	10 unit	20 unit
			4) Jumlah pembudidaya yang bersertifikasi CBiB	38 unit	72 unit	144 unit	72 unit	108 unit	162 unit
b.	Pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan pembudidaya ikan	Terpantaunya penyebaran hama dan penyakit ikan di Provinsi Babel, serta	1) Menurunnya jumlah hama dan penyakit ikan di Babel	2 jenis	1 jenis	0	1 jenis	0	0

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET						
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEP. BABEL										
		terpenuhinya kebutuhan obat dan vaksin bagi kesehatan ikan dan tersedianya data kualitas air budidaya	2) Menurunnya persentase pencemar perairan perikanan budidaya	80%	60%	40%	50%	25%	0%	
			3) Tersedianya mobil kesling		1 Unit	3 Unit	1 Unit	1 Unit	4 Unit	
			4) Terdirinya bangunan lab. Kesling				1 unit	1 unit	3 unit	
c.	Pengembangan Sistem sarana dan prasarana pembudidayaan ikan		Kawasan perikanan budidaya di Babel yang memiliki Sarpras memadai untuk budidaya ikan dan memanfaatkan UPTD bagi pembudidaya ikan	1) Kawasan perikanan budidaya di Babel yang memiliki Sarpras memadai untuk budidaya ikan			2 Kawasan	4 Kawasan	7 Kawasan	14 Kawasan
			2) Persentase pemanfaatan UPTD bagi pembudidaya ikan di Provinsi kep. Babel		50%	60%	60%	80%	100%	
d.	Pengembangan Sistem Pembenihan dan kesehatan Ikan UPTD BBIS Pemali	Terpenuhinya kebutuhan benih yang bermutu dan terwujudnya sistem kesehatan	1) Kawasan perikanan budidaya di Babel yang memiliki Sarpras memadai untuk budidaya ikan				2 Kawasan	4 Kawasan	7 Kawasan	14 Kawasan
KEGIATAN										
C.	Penyuluhan Perikanan									
SUB KEGIATAN										
a.	Pengembangan dan Peningkatan Sistem Penyuluhan Perikanan	Meningkatnya sistem penyuluhan perikanan yang berwawasan IPTEK	1) Persentase Jumlah Tenaga Penyuluh Terampil	75%	80%	85%	90%	95%	100%	
			2) Persentase Kinerja Penyuluh yang Optimal	75%	80%	85%	90%	95%	100%	
b.	Pengembangan sarana dan prasarana Penyuluhan Perikanan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Penyuluhan	1) Persentase Jumlah DOP Penyuluh	75%	80%	85%	90%	95%	100%	
			2) Persentase Jumlah sarana dan prasarana pendukung penyuluhan	75%	80%	85%	90%	95%	100%	
UPTD BALAI BENIH IKAN SENTRAL (BBIS) PEMALI										
KEGIATAN										
D.	Tata Usaha UPTD BBIS Pemali									
SUB KEGIATAN										
a.	Operasional UPTD BBIS Pemali	Tersedianya bahan dan perlengkapan Operasional Balai Benih Ikan Sentral (BBIS)	Lancarnya Operasional Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Pemali				12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
KEGIATAN										
E.	Produksi dan Pembenihan UPTD BBIS Pemali									
SUB KEGIATAN										
a.	Pengembangan Sarana dan Prasarana BBIS Pemali	Prasarana Pokok BBIS	Tersedianya Prasarana Pokok pada Balai Benih Ikan Sentral (BBIS)				1 Paket	1 Paket	1 Paket	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET						
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEP. BABEL										
UPTD BALAI BENIH IKAN AIR PAYAU (BBIAIP) TANJUNG KRASAK, TOBOALI										
KEGIATAN										
F. Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan										
UPTD BBIS Pemali										
SUB KEGIATAN										
a.	Pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan pembudidaya ikan	Terkendalinya hama dan penyakit ikan di UPTD BBIS Pemali serta terpenuhinya kebutuhan obat dan vaksin bagi kesehatan ikan	Menurunnya jumlah hama dan penyakit ikan di UPTD BBIS Pemali					1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis
UPTD BALAI BENIH IKAN AIR PAYAU (BBIAIP) TANJUNG KRASAK, TOBOALI										
KEGIATAN										
G. Tata Usaha UPTD BBIAIP Tanjung Krasak, Toboali										
SUB KEGIATAN										
a.	Operasional UPTD BBIAIP Tanjung Krasak, Toboali	Tersedianya bahan dan perlengkapan Operasional Balai Benih Ikan Air Payau Tanjung Krasak, Toboali	Lancarnya Operasional Balai Benih Ikan Air Payau Tanjung Krasak, Toboali					12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
KEGIATAN										
H. Produksi dan Pembenihan BBIAIP Tanjung Krasak, Toboali										
SUB KEGIATAN										
a.	Pengembangan Sarana dan Prasarana UPTD BBIAIP Tanjung Krasak, Toboali	Prasarana Pokok UPTD BBIAIP Tanjung Krasak, Toboali	Tersedianya Prasarana Pokok pada UPTD BBIAIP Tanjung Krasak, Toboali					1 Paket	1 Paket	1 Paket
KEGIATAN										
I. Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan UPTD BBIAIP Tanjung Krasak, Toboali										
SUB KEGIATAN										
a.	Pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan pembudidaya ikan	Terkendalinya hama dan penyakit ikan di UPTD BBIAIP Tanjung Krasak, Toboali serta terpenuhinya kebutuhan obat dan vaksin bagi kesehatan ikan	Menurunnya jumlah hama dan penyakit ikan di UPTD BBIAIP Tanjung Krasak, Toboali					1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis
UPTD BALAI BENIH IKAN AIR LAUT (BBIL) TANJUNG RUSA, BELITUNG										
KEGIATAN										
J. Tata Usaha UPTD Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa, Belitung										
SUB KEGIATAN										
a.	Operasional UPTD Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa, Belitung	Tersedianya bahan dan perlengkapan Operasional UPTD Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa, Belitung	Lancarnya Operasional UPTD Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa, Belitung					12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
KEGIATAN										

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					
				2012	2013	2014	2015	2016	2017

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEP. BABEL									
K.	Produksi dan Pembenihan UPTD Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa, Belitung								
SUB KEGIATAN									
a.	Pengembangan Sarana dan Prasarana UPTD Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa, Belitung	Prasarana Pokok UPTD Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa, Belitung	Tersedianya Prasarana Pokok pada UPTD Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa, Belitung				1 Paket	1 Paket	1 Paket
KEGIATAN									
I.	Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan UPTD BBIAP Tanjung Krasak, Toboali								
SUB KEGIATAN									
a.	Pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan pembudidaya ikan	Terkendalinya hama dan penyakit ikan di UPTD Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa, Belitung serta terpenuhinya kebutuhan obat dan vaksin bagi kesehatan ikan	Menurunnya jumlah hama dan penyakit ikan di UPTD Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa, Belitung				1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis
BIDANG BINA USAHA DAN PEMASARAN									
PROGRAM									
4.	Pengembangan Pengolahan, Pemasaran, Pengujian dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya produk olahan bernilai tambah, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, investasi, distribusi dan akses pasar hasil perikanan	Jumlah pangsa pasar ekspor, penambahan jumlah ragam produk ekspor, nilai ekspor/volume ekspor serta jumlah impor terkendali sesuai standar dan kebutuhan						
KEGIATAN									
A.	Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan	Meningkatnya jumlah nilai investasi bidang P2HP dan jumlah UP yang memenuhi standar ketenagakerjaan	Jumlah unit usaha P2HP yang memenuhi standar ketenagakerjaan yang kompeten dan kapable	unit	unit	unit	unit	unit	unit
SUB KEGIATAN									
a.	Temu Bisnis Peluang Usaha dan Investasi P2HP	Terlaksananya promosi usaha dan investasi	Jumlah investasi di bidang P2HP	1	1	1			
b.	Rekrutmen KKMB	Tersedianya KKMB yang memiliki kemampuan dalam mendampingi UMKM di kabupaten/kota	Jumlah KKMB yang dibina dan dikembangkan	7 orang	14 orang	21 orang			
c.	Temu Koordinasi UMKM, KKMB dan Perbankan	Meningkatnya UMKM yang melakukan kemitraan usaha dalam rangka pengembangan minapolitan	Jumlah kredit yang difasilitasi KKMB	0,7 milyar	1 milyar	1,2 milyar	Dijilangkan		
d.	Pembinaan PUMP-P2HP	Meningkatnya kompetensi Poklaksar dalam mengembangkan usaha P2HP	Jumlah Poklaksar yang meningkat kompetensi usahanya	14 Poklaksar	21 Poklaksar	25 Poklaksar			

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEP. BABEL									
e.	Pameran Sektor Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya Jumlah investasi bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.Meningkatnya pemahaman orang diluar Babel tentang peluang usaha dan investasi yang ada di Babel	Terpromosikannya Produk Perikanan Khas Babel dan Babel Sebagai Daerah Tujuan Investasi Usaha Perikanan dan Kelautan				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
f.	Pendataan Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	Terdatanya UMKM bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang baik sesuai bidang usahanya	Tersedianya Data UMKM Bidang P2HP yang baik sesuai bidang usahanya.					1 Dokumen	1 Dokumen
g.	Monitoring Pemanfaatan Bantuan Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	Mendapatkan Dokumen Pelaporan Monev yang efektif dan akuntabel.	Tersedia data Monitoring					1 Dokumen	1 Dokumen
KEGIATAN									
B.	Fasilitasi Pemasaran dan Pemodalan								
SUB KEGIATAN									
a.	Forum Bisnis Antar Pelaku Pemasaran Hasil Perikanan	Terjalinya Kemitraan Pemasaran, Optimalisasi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pemasaran Produk Perikanan yang telah dibangun oleh pemerintah melalui peningkatan peran serta para pelaku usaha pemasaran dan Fasilitasi Pelaku Usaha Pemasaran	Pelaksanaan kegiatan forum bisnis	1	1	1			
b.	Pengembangan data dan informasi hasil perikanan (warta pasar ikan)	Tersedianya data base pemasaran hasil perikanan dimasing-masing kabupaten/kota dan tersedianya hasil analisa pemasaran untuk komoditas unggulan di masing-masing kabupaten/kota.		7 lokasi	7 lokasi	7 lokasi			
c.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemasaran dalam negeri	Meningkatnya Jumlah Fasilitas Sarana dan Prasarana Hasil Perikanan	Jumlah Pelelangan Ikan, Pasar Ikan Tradisional yang dibina dan dikembangkan Agar dapat berfungsi sesuai standar	2 pasar	4 pasar	6 pasar			
d.	Lomba masak serba ikan dan pameran	Mempromosikan Masakan Khas berbahan dasar ikan dan Produk olahan Hasil Perikanan Prov.kep Babel ke Tingkat Nasional dan Internasional	Jumlah Lokasi Pelaksanaan Promosi dan Kerjasama Pemasaran Hasil Perikanan Dalam Negeri Melalui Gemarikan	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	Dihilangkan		
e.	Kampanye GEMARIKAN Dan Pemberian Makanan Tambahan Berbahan Baku Ikan (PMTAS)	Terselenggaranya kampanye Gemarikan di seluruh Kabupaten/kota sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan	Jumlah Angka Konsumsi Ikan kg/Kapita/Tahun	44	49	55			
				kg/kapita/tahun	kg/kapita/tahun	kg/kapita/tahun			

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEP. BABEL									
f.	Pemantauan Hasil Ekspor	Tersedianya data kegiatan-kegiatan ekport hasil perikanan yang tidak tercatat untuk selanjutnya dijadikan sebagai bahan penyusunan rekomendasi kebijakan.	Dokumen data ekspor hasil perikanan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			
g.	Pengadaan peralatan pemasaran hasil perikanan	Tersedianya sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan	Lokasi pengembangan pemasaran di kab/kota	7 lokasi	7 lokasi	7 lokasi			
h.	Pembinaan Pasar Hasil Perikanan se-Bangka Belitung	Terlaksananya pembinaan pasar ikan se-Bangka Belitung	Pasar yang sesuai dengan standar				18 pasar	18 pasar	20 pasar
i.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemasaran	Meningkatnya jumlah fasilitas sarana dan prasarana hasil perikanan	Jumlah pelelangan ikan, pasar ikan tradisional yang dibina dan dikembangkan sesuai standar				8 pasar	10 pasar	12 pasar
j.	Workshop Perhitungan Angka Konsumsi Ikan untuk Dua Semester	Terselenggaranya workshop di kab/kota	Mengetahui Angka Konsumsi Ikan di kab/kota				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
k.	Lomba Masak Tk. Provinsi dan Nasional, Bazar Hasil Perikanan, Safari Gemarikan, Pemamfaatan Mobil ATI dan Rakor FORIKAN	Terselenggaranya kampanye Gemarikan di seluruh Kab/kota sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan	Jumlah Angka Konsumsi Ikan Kg/Kapita/Tahun meningkat				47 Kg/kap/tahun	48 Kg/kap/tahun	49 kg/kap/tahun
KEGIATAN									
C.	Pengolahan dan Pembinaan Mutu Perikanan								
SUB KEGIATAN									
a.	Fasilitas Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	Meningkatnya volume produk olahan hasil perikanan yang bernilai tambah dengan kemasan dan mutu terjamin	1) Jumlah Sarana dan Prasaran Pengolahan Hasil Perikanan yang Sesuai dengan Target Produksi Pengolahan 2) Jumlah unit pengolahan ikan yang memenuhi standar mutu hasil perikanan	7 Lokasi	8 Lokasi	9 Lokasi			
b.	Fasilitas Pengembangan Produk Hasil Perikanan Non Konsumsi	Berkembangnya produk non konsumsi hasil perikanan yang berdaya saing	1) Jumlah UMKM produk perikanan non konsumsi yang dibina dan dikembangkan 2) Lokasi Promosi dan Jaringan Pemasaran Ikan Hias	7 lokasi	8 lokasi	9 lokasi			
c.	Sertifikasi SKP untuk UPI se Prov. Kepulauan Bangka Belitung	Meningkatnya jaminan mutu dan keamanan atas produk perikanan yang dihasilkan UPI	Jumlah Sertifikat Kelayakan Pengolahan	1 lokasi	2 lokasi	3 lokasi			
d.	Bimbingan Teknis Pembina Mutu Daerah	Tersedianya Pembina Mutu Daerah	Meningkatnya Jumlah Pembina Mutu Daerah				20 SKP	23 SKP	27 SKP
e.	Pembinaan dan Pengembangan Produk Olahan Hasil Perikanan konsumsi	Meningkatnya Volume Produk Olahan hasil perikanan yang bernilai tambah dan terjamin mutunya	1. Jumlah Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan 2. Jumlah Unit Pengolah Ikan yang memenuhi jaminan mutu hasil perikanan				10 Lokasi	11Lokasi	12 Lokasi
							9 UPI	11 UPI	13 UPI

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEP. BABEL									
f.	Pembinaan Pelaku Usaha Produk Perikanan Nonkonsumsi	Berkembangnya Produk Nonkonsumsi hasil perikanan yang berdayasaing	1. Jumlah UMKM produk perikanan non konsumsi yang dibina dan dikembangkan				10 UPPN	11 UPPN	12 UPPN
			2. Lokasi Promosi dan Jaringan Pemasaran Nonkonsumsi				4 Lokasi	5 Lokasi	6 Lokasi
UPTD LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL PERIKANAN (LPPMHP) KETAPANG									
KEGIATAN									
D.	Tata Usaha UPTD LPPMHP								
a.	Operasional UPTD LPPMHP	Meningkatnya operasional UPTD LPPMHP	Pelaksanaan operasional UPTD LPPMHP				1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
			pengadaan sarana dan prasarana penunjang operasional UPTD LPPMHP				1 Paket	1 Paket	1 Paket
b.	Peningkatan sarana dan prasarana UPTD LPPMHP	Sarana dan prasarana operasional UPTD LPPMHP							
KEGIATAN									
E.	Pengujian Mutu Hasil Perikanan								
a.	Peningkatan sarana dan prasarana peralatan pengujian mutu hasil perikanan	sarana dan prasarana peralatan pengujian mutu hasil perikanan	Pengadaan sarana dan prasarana peralatan pengujian mutu hasil perikanan				1 Paket	1 Paket	1 Paket
			Jumlah sampel yang diuji di dapat dari TPI, PPI, Unit Pengolahan Ikan (UPI), UMKM Produk hasil perikanan						
b.	Monitoring, pembinaan dan pengujian mutu produk hasil perikanan terhadap kandungan mikrobiologi dan penggunaan bahan kimia berbahaya	Meningkatnya jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada TPI, PPI, Unit Pengolahan Ikan (UPI), UMKM Produk hasil perikanan di 7 Kab/Kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung					120 Sampel	240 Sampel	540 Sampel
KEGIATAN									
F.	Pengendalian Mutu Hasil Perikanan								
a.	Peningkatan kapasitas kelembagaan UPTD LPPMHP	Meningkatnya akreditasi UPTD LPPMHP	Jumlah parameter uji yang terakreditasi				0 Parameter Uji	0 Parameter Uji	6 Parameter Uji
			Jumlah SDM LPPMHP yang melaksanakan pelatihan				15 Orang	20 Orang	20 Orang
c.	Peningkatan kapasitas SDM Analis UPTD LPPMHP	Meningkatnya kapasitas SDM Analis UPTD LPPMHP	Jumlah SDM Analis LPPMHP yang melaksanakan magang				6 Orang	6 Orang	8 Orang
BIDANG KELAUTAN DAN PENGAWASAN									
PROGRAM									
5.	Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Serta Sumber Daya Perikanan	Meningkatnya penataan dan pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat dan Bangka Belitung bebas IUU fishing							
KEGIATAN									

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET						
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEP. BABEL										
A.	Pengawasan Pengendalian Sumberdaya Ikan dan Ekosistem Laut									
SUB KEGIATAN										
a.	Peningkatan Operasional Pengawasan Sumberdaya Kelautan;	1) Pembinaan usaha perikanan yang memenuhi ketentuan usaha dan mematuhi peraturan perundang-undangan diwilayah bagian barat	1) Tertibnya administrasi/dokumen disetiap kapal perusahaan di Bangka Belitung	7 Dok	7 Dok	7 Dok				
		2) Jumlah wilayah perairan yang bebas dari kegiatan illegal fishing dan merusak ekosistem perairan	2) Terkendalinya tindak pidana pelanggaran di perairan Bangka Belitung	7 Pkt	7 Pkt	7 Pkt	Dihilangkan			
		3) Jumlah wilayah perairan yang bebas dari kegiatan pencemaran dan yang merusak sumberdaya non hayati dan pemanfaatan jasa kelautannya	3) Terjaganya lingkungan ekosistem yang baik dari pencemaran perairan	7 Pkt	7 Pkt	7 Pkt	Dihilangkan			
		4) Laporan Inventarisasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan	4) Jumlah kawasan konservasi yang dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan				1 Lap	1 Lap	1 Lap	
b.	Pengembangan sarana dan prasarana pengawasan	1) Jumlah Pemenuhan sarana dan prasarana pengawasan yang memadai secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	1) Terwujudnya kapal-kapal pengawasan dan petugas pengawasan yang profesional	7 Unit	7 Unit	7 Unit	Dihilangkan			
		2) Perawatan dan Pemeliharaan kapal pengawasan perikanan	2) Terpeliharanya kapal kapal pengawasan perikanan	7 Unit	7 Unit	7 Unit	1 Unit	2 Unit	2 Unit	
		3) Peningkatan dana biaya operasional kapal pengawasan perikanan	3) Terlaksananya operasional pengawasan di territorial perairan Bangka Belitung	7 Pkt	7 Pkt	7 Pkt	7 Pkt	7 Pkt	7 Pkt	
		1) Kelengkapan data dan analisis kasus tindak pidana kelautan dan perikanan yang akubtabel dan tepat waktu	1) Data dan informasi penanganan pelanggaran yang akuntabel dan tepat waktu	7 Pkt	7 Pkt	7 Pkt	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
c.	Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	2) Penertiban jumlah pelaku usaha yang melanggar tindak pidana perikanan	2) Patuh pada peraturan perundang undangan usaha perikanan;	7 Pkt	7 Pkt	7 Pkt	Dihilangkan			
		3) Forum Koordinasi antar aparat penegak hukum yang terselenggara	3) Jumlah Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang aktif berperan;				1 Kali	1 Kali	1 Kali	
d.	Pembentukan kelompok pokmaswas;	Terbentuknya kelompok masyarakat pengawas	Teridentifikasinya pelanggaran tindak pidana di perairan Bangka Belitung	7 Pkt	7 Pkt	7 Pkt	Dihilangkan			

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEP. BABEL									
e.	Operasional Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan;	Kelompok Masyarakat Pengawasan [POKMASWAS] yang berperan aktif Dalam Pengawasan SDKP	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas [POKMASWAS] yang berperan aktif dalam kegiatan pengawasan SDKP	7 Pkt	7 Pkt	7 Pkt	22 Klmpk	30 Klmpk	35 Klmpk
f.	Peningkatan kualitas SDM pengawasan	Meningkatnya SDM bidang pengawasan dalam penegakan hukum pelanggaran tindak pidana	Tercapainya petugas PPNS yang professional insiatif berkualitas	7 Pkt	7 Pkt	7 Pkt	2 Orang	3 Orang	4 Orang
g.	Dukungan manajemen dan administrasi dan dukungan teknis lainnya Ditjen PSDKP	Terwujudnya perencanaan dan pelaporan program anggaran serta kerjasama secara terintegrasi, akuratabel dan tepat waktu berdasarkan data yang terkini dan akurat	Tercapainya sasaran teknis dan dukungan administrasi kegiatan Ditjen PSDKP	7 Pkt	7 Pkt	7 Pkt	Dihilangkan		
KEGIATAN									
B.	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir								
SUB KEGIATAN									
a.	Pelayanan usaha dan pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau kecil;	Jumlah kelompok usaha mikro di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yg bankable	1) Pengembangan sarana usaha Mikro LKM 2) Dana Pemberdayaan Masyarakat Pesisir 3) Tenaga Pendamping 4) Kelompok Usaha Mikro 5) Penyusunan data dan informasi calon debitur KUR 6) Sosialisasi Akses KUR sektor kelautan dan perikanan	7 Unit 7 Pkt 7 Orang 7 Unit	7 Unit 7 Pkt 7 Orang 7 Unit	7 Unit 7 Pkt 7 Orang 7 Unit	Dihilangkan		
b.	Pembangunan Kedai Pesisir	Jumlah Kedai Pesisir	Pengembangan Kedai pesisir yang sudah ada dan membangun yang belum ada	7 Unit	7 Unit	7 Unit	1 keg	1 keg	1 keg
c.	Pembentukan Kelompok Masy. Pencinta Lingkungan Pesisir	Jumlah kelompok Masy. Pencinta Lingkungan Pesisir	Terbentuknya Kelompok Masy.Pencinta Lingkungan Pesisir	7 Klmpk	7 Klmpk	7 Klmpk			
d.	Penyusunan Database dan Informasi Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil;	1) Tersedianya buku panduan teknis dalam proses penyusunan data 2) Meningkatnya kegiatan pengumpulan data dan informasi 3) Terbentuknya suatu jaringan sistem informasi dan manajemen database	1) Membuat buku panduan teknis Pedoman Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau kecil (KP3K) 2) Pengidentifikasi kebutuhan data dan informasi sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 3) Penyusunan database sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	80 buku 7 Pkt 7 Pkt	80 buku 7 Pkt 7 Pkt	80 buku 7 Pkt 7 Pkt			

[illegible]

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET									
				2012	2013	2014	2015	2016	2017				
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEP. BABEL													
		3) jumlah kawasan laut yg memiliki peta potensi & arahan pemanfaatan yg terintegrasi	3) Jumlah kawasan perairan laut yg di jadikan kawasan konservasi laut	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	Dituangkan						
		4) Kawasan konservasi yang dilakukan upaya perlindungan dan pelestariannya	3) Pembentukan kelembagaan dan zonasi kawasan konservasi				1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan				
		b. Pendayagunaan Pesisir dan lautan	1) Pelaporan akuntansi pelaksanaan anggaran dan pembukaan yang baik, benar, akurat serta tepat waktu	1) Dokumen pelaporan akuntansi yang baik, benar, akurat serta tepat waktu	1 Dok	1 Dok	1 Dok	Dihilangkan					
			2) Jumlah luasan kawasan Pesisir yg rusak pulih kembali melalui Transplantasi karang dan Terumbu karang buatan	2) Pulihnya perairan pesisir seluas 20.000 ha	2.000 ha	3.000 ha	5.000 ha						
		3) Kawasan lokasi BMKT terpetakan	3) Jumlah BMKT terpetakan di 12 lokasi	2 lok	2 lok	2 lok	Dihilangkan						
		4) Jumlah pulau yg teridentifikasi & terpetakan potensinya secara akurat	4) Jumlah pulau kecil yang teridentifikasi & terpetakan sebanyak 54 pulau	2 pulau	7 pulau	10 pulau							
		c. Penyusunan data base dan informasi statistik Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Informasi data statistik Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Dokumen statistik KP3K, pertahun							1 Dok	1 Dok	1 Dok
			d. Fasilitas rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut	Masyarakat Pesisir dan pulau-pulau kecil, pelajar, kelompok masyarakat pengawas perikanan	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terkait pemeliharaan ekosistem pesisir dan laut							2 Lokasi	2 Lokasi

Pangkalpinang, Juni 2015
Kepala Dinas
Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kep. Bangka Belitung

Ir. SARJULIANTO, Dipl. SE
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19580710 198603 1 007

KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012 - 2017
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (JUTA)						TOTAL ALOKASI
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEP. BABEL		3.993	27.272	41.489	43.751	48.568	72.912	226.224
SEKRETARIAT		377	566	727	4.204	5.793	6.814	18.481
PROGRAM								
1.	Program Dukungan Manajemen dan Teknis Kelautan dan Perikanan	377	566	727	4.204	5.793	6.814	18.481
KEGIATAN								
A.	Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan Money Pembangunan Kelautan dan Perikanan							
		350	500	651	850	1.001	1.151	4.503
SUB KEGIATAN								
a.	Penyiapan Dokumen Perencanaan	100	143	186	243	286	329	1.287
b.	Pelaporan Kegiatan	20	29	37	49	57	66	258
c.	Money Pembangunan Kelautan dan Perikanan	80	114	149	194	229	263	1.029
d.	Penunjang Kegiatan Koordinasi Lainnya	150	214	279	364	429	493	1.929
KEGIATAN								
B.	Pembinaan Pelaksanaan dan Koordinasi Pengelolaan Keuangan							
		-	38	46	485	731	799	2.100
SUB KEGIATAN								
a.	Peningkatan pengetahuan dan kemampuan serta pemahaman SDM di bidang pengelolaan keuangan daerah maupun Negara	-	10	15	20	100	100	245
b.	Penyenggaraan akuntansi pelaksanaan anggaran dan pembukuan	-	25	27	29	100	110	291
c.	Penyusunan Pertanggung jawaban keuangan	-	3	4	5	14	20	46
d.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan				431,22	517,46	569,21	1.518
KEGIATAN								
C.	Pengelolaan Kepegawaian dan Barang DKP							
		26,8	28,4	30,0	2.868,7	4.060,1	4.863,8	11.877,8
SUB KEGIATAN								
a.	penyediaan jasa surat menyurat	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	19,8
b.	penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	25	26	27	28	29	30	165
c.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				27,10	32,52	35,77	95
d.	Perbaikan Perbaikan Peralatan Kerja				90,00	108,00	129,60	328
e.	Penyediaan Alat Tulis Kantor				167,54	201,05	241,26	610

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (JUTA)						TOTAL ALOKASI
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEP. BABEL		3.993	27.272	41.489	43.751	48.568	72.912	226.224
f.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				65,00	78,00	93,60	237
g.	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Kantor				3,75	4,50	5,40	14
h.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan				7,92	9,50	11,40	29
i.	Penyediaan Makanan dan Minuman				53,00	63,60	76,32	193
j.	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah				336,00	403,20	483,84	1.223
k.	Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Administrasi Perkantoran				1.158,00	1.389,60	1.667,52	4.215
l.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan gedung kantor				466,65	559,98	671,98	1.699
m.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor					200,00	240,00	440
n.	Penyediaan Jasa pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional				462,13	554,56	665,47	1.682
o.	Pengelolaan Kepegawaian dan Barang DKP					122,40	146,88	269
p.	Penunjang Pelaksanaan kegiatan Fungsional dan Diklat Fungsional					300,00	360,00	660
BIDANG PERIKANAN TANGKAP		400	6.830	17.710	16.820	4.670	21.205	69.970
PROGRAM								
2.	Pengembangan Perikanan Tangkap	400	6.830	17.710	16.820	4.670	21.205	69.970
KEGIATAN								
A.	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	400	3.300	14.700	14.725	2.675	18.965	54.765
SUB KEGIATAN								
a.	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	400	1.400	1.400	1.225	1.225	775	6.425
b.	Pengembangan Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan	-	950	6.650	6.750	-	16.450	30.800
c.	Pembinaan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan	-	950	6.650	6.750	1.450	1.740,00	17.540
KEGIATAN								
B.	Produksi Penangkapan dan Perizinan		1.595	1.495	900	800	1.100	5.890
SUB KEGIATAN								
a.	Peningkatan Kesejahteraan Nelayan		500	500	500	500	500	2.500
b.	Peningkatan pelayanan perizinan		100	100	100	100	100	500
c.	Dukungan Pelayanan perizinaan kapal perikanan ukuran 30 - 60 GT		75	75	-	-	-	150
d.	Peningkatan SDM nelayan		400	400	200	200	400	1.600

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (JUTA)						TOTAL ALOKASI
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEP. BABEL		3.993	27.272	41.489	43.751	48.568	72.912	226.224
e.	Pembekalan keselamatan pelayanan nelayan, jalur-jalur penangkapan dan lampu-lampu navigasi		420	420	-	-	-	840
f.	Diklat cek fisik kapal tingkat Provinsi		100		100		100	300
KEGIATAN								
C.	Usaha dan Prasarana		1.935	1.515	1.195	1.195	1.140	9.315
SUB KEGIATAN								
a.	Peningkatan kualitas SDM Perikanan Tangkap		915	595	595	595	515	3.215
b.	Pengembangan Pelabuhan Perikanan dan Alat Penangkap Ikan		1.020	920	600	600	625	6.100
BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA		-	7.430	9.125	16.500	27.300	29.679	90.034
PROGRAM								
3.	Pengembangan Perikanan Budidaya	-	7.430	9.125	16.500	27.300	29.679	90.034
KEGIATAN								
A.	Produksi dan Pengendalian Budidaya Ikan		4.190	5.280	6.900	7.910	9.350	33.630
SUB KEGIATAN								
a.	Pengembangan sistem produksi pembudidayaan ikan		850	1.070	1.670	1.830	2.040	7.460
b.	Pengembangan sistem usaha pembudidayaan ikan		3.340	4.210	5.230	6.080	7.310	26.170
KEGIATAN								
B.	Pembudidayaan, Pembenihan dan Kesehatan		2.708	3.249	3.869	4.782	6.033	20.641
SUB KEGIATAN								
a.	Pengembangan Sistem Pembenihan		58	69	89	125	188	529
b.	Pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan pembudidaya ikan		450	540	612	856	1.284	3.742
c.	Pengembangan Sistem sarana dan prasarana pembudidayaan ikan		2.200	2.640	3.168	3.801	4.561	16.370
KEGIATAN								
C.	Penyuluhan Perikanan		532	596	781	2.108	1.796	5.813
SUB KEGIATAN								
a.	Pengembangan dan Peningkatan Sistem Penyuluhan Perikanan		471	524	475	671	412	2.551
b.	Pengembangan sarana dan prasarana Penyuluhan Perikanan		62	72	307	1.437	1.385	3.262
UPTD BALAI BENIH IKAN SENTRAL (BBIS) PEMALI		-	-	-	1.974,91	5.000,00	5.000,00	11.974,91
KEGIATAN								

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (JUTA)						TOTAL ALOKASI
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEP. BABEL								
D.	Tata Usaha UPTD BBIS Pemali							
SUB KEGIATAN								
a.	Operasional UPTD BBIS Pemali					400,00	1.000,00	1.000,00
KEGIATAN								
E.	Produksi dan Pembenihan UPTD BBIS Pemali					1.574,91	2.000,00	2.000,00
SUB KEGIATAN								
a.	Pengembangan Sarana dan Prasarana BBIS Pemali					1.574,91	2.000,00	2.000,00
KEGIATAN								
F.	Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan UPTD BBIS Pemali					-	2.000,00	2.000,00
SUB KEGIATAN								
a.	Pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan pembudidaya ikan						2.000,00	2.000,00
UPTD BALAI BENIH IKAN AIR PAYAU (BBIAP) TANJUNG KRASAK, TOBOALI								
		-	-	-	-	999,97	2.500,00	2.500,00
KEGIATAN								
G.	Tata Usaha UPTD BBIAP Tanjung Krasak, Toboali					300,00	500,00	500,00
SUB KEGIATAN								
a.	Operasional UPTD BBIAP Tanjung Krasak, Toboali					300,00	500,00	500,00
KEGIATAN								
H.	Produksi dan Pembenihan BBIAP Tanjung Krasak, Toboali					699,97	1.000,00	1.000,00
SUB KEGIATAN								
a.	Pengembangan Sarana dan Prasarana UPTD BBIAP Tanjung Krasak, Toboali					699,97	1.000,00	1.000,00
KEGIATAN								
I.	Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan UPTD BBIAP Tanjung Krasak, Toboali					-	1.000,00	1.000,00
SUB KEGIATAN								
a.	Pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan pembudidaya ikan						1.000,00	1.000,00
UPTD BALAI BENIH IKAN AIR LAUT (BBIL) TANJUNG RUSA, BELITUNG								
		-	-	-	-	1.974,91	5.000,00	5.000,00
KEGIATAN								
J.	Tata Usaha UPTD Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa, Belitung					400,00	1.000,00	1.000,00
SUB KEGIATAN								
a.	Operasional UPTD Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa, Belitung					400,00	1.000,00	1.000,00

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (JUTA)						TOTAL ALOKASI	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEP. BABEL		3.993	27.272	41.489	43.751	48.568	72.912	226.224	
KEGIATAN									
K.	Produksi dan Pembenihan UPTD Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa, Belitung					1.574,91	2.000,00	2.000,00	5.574,91
SUB KEGIATAN									
a.	Pengembangan Sarana dan Prasarana UPTD Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa, Belitung					1.574,91	2.000,00	2.000,00	5.574,91
KEGIATAN									
1.	Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan UPTD BBIAP Tanjung Krasak, Toboali					-	2.000,00	2.000,00	4.000,00
SUB KEGIATAN									
a.	Pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan pembudidaya ikan						2.000,00	2.000,00	4.000,00
BIDANG BINA USAHA DAN PEMASARAN		3.216	6.730	7.256	2.177	5.556	8.664	19.504	
PROGRAM									
4.	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Kelautan dan Perikanan	3.216	6.730	7.256	2.177	5.556	8.664	19.504	
KEGIATAN									
A.	Facilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistim Usaha dan Investasi Perikanan	836	1.000	1.271	235	650	800	4.792	
SUB KEGIATAN									
a.	Temu Bisnis Peluang Usaha dan Investasi P2HP	76	80	88				244	
b.	Rekrutmen KKMB	110	115	122				347	
c.	Temu Koordinasi UMKM, KKMB dan Perbankan	600	750	1.000				2.350	
d.	Pembinaan PUMP-P2HP	50	55	61				166	
e.	Pameran Sektor Kelautan dan Perikanan				235	300	350	885	
f.	Pendataan Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan					200	250	450	
g.	Monitoring Pemanfaatan Bantuan Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan					150	200	350	
KEGIATAN									
B.	Facilitasi Pemasaran dan Permodalan	2.380	3.580	3.780	637	875	1.134	2.646	
SUB KEGIATAN									
a.	Forum Bisnis Antar Pelaku Pemasaran Hasil Perikanan	200	200	200					

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (JUTA)						TOTAL ALOKASI
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEP. BABEL		3.993	27.272	41.489	43.751	48.568	72.912	226.224
b.	Pengembangan data dan informasi hasil perikanan (warta pasar ikan)	50	50	50				
c.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemasaran dalam negeri	750	900	1.000				
d.	Lomba masak serba ikan dan pameran	200	250	300				
e.	Kampanye GEMARIKAN Dan Pemberian Makanan Tambahan Berbahan Baku Ikan (PMTAS)	150	150	200				
f.	Pemantauan Hasil Ekspor	30	30	30				
g.	Pengadaan peralatan pemasaran hasil perikanan	1.000	2.000	2.000				
h.	Pembinaan Pasar Hasil Perikanan se- Bangka Belitung				80	80	100	260
i.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemasaran				200	200	260	660
j.	Workshop Perhitungan Angka Konsumsi Ikan untuk Dua Semester				75	75	97,50	248
k.	Lomba Masak Tk. Provinsi dan Nasional, Bazar Hasil Perikanan, Safari Gemarikan, Pemanfaatan Mobil ATI dan Rakor FORIKAN				282,14	520	676	1.478
KEGIATAN								
C.	Pengolahan dan Pembinaan Mutu Perikanan	-	2.150	2.205	360	1.081	1.230	2.671
SUB KEGIATAN								
a.	Fasilitas pengembangan industri pengolahan hasil perikanan		1.930	1.965				
b.	Fasilitas pengembangan produk hasil perikanan non konsumsi		220	240				
c.	Sertifikasi SKP untuk UPI se Prov. Kepulauan Bangka Belitung				150	200	225	575
d.	Bimbingan Teknis Pembina Mutu Daerah				210	281	300	791
e.	Pembinaan dan Pengembangan Produk Olahan Hasil Perikanan konsumsi					300	345	645
f.	Pembinaan Pelaku Usaha Produk Perikanan Nonkonsumsi					300	360	660
UPTD LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL PERIKANAN (LPPMHP) KETAPANG		-	-	-	945	2.950	5.500	9.395
KEGIATAN								
D.	Tata Usaha UPTD LPPMHP	-	-	-	250	650	800	1.700
SUB KEGIATAN								
a.	Operasional UPTD LPPMHP				250	400	500	1.150
b.	Peningkatan sarana dan prasarana UPTD LPPMHP					250	300	550
KEGIATAN								

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (JUTA)						TOTAL ALOKASI
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEP. BABEL		3.993	27.272	41.489	43.751	48.568	72.912	226.224
E.	Pengujian Mutu Hasil Perikanan	-	-	-	285	1.300	3.400	4.985
SUB KEGIATAN								
a.	Peningkatan sarana dan prasarana peralatan pengujian mutu hasil perikanan				250	1.000	3.000	4.250
b.	Monitoring, pembinaan dan pengujian mutu produk hasil perikanan terhadap kandungan mikrobiologi dan penggunaan bahan kimia berbahaya				35	300	400	735
KEGIATAN								
F.	Pengendalian Mutu Hasil Perikanan	-	-	-	410	1.000	1.300	2.710
SUB KEGIATAN								
a.	Peningkatan kapasitas kelembagaan UPTD LPPMHP				350	450	600	1.400
b.	Peningkatan kapasitas SDM UPTD LPPMHP				20	300	400	720
c.	Peningkatan kapasitas SDM Analis UPTD LPPMHP				40	250	300	590
BIDANG KELAUTAN DAN PENGAWASAN			5.716	6.671	4.050	5.250	6.550	28.236
PROGRAM								
5.	Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Serta Sumber Daya Perikanan	-	5.716	6.671	4.050	5.250	6.550	28.236
KEGIATAN								
A.	Pengawasan Pengendalian Sumberdaya Ikan dan Ekosistem Laut		1.805	2.660	2.250	3.050	3.850	13.615
SUB KEGIATAN								
a.	Peningkatan Operasional Pengawasan Sumberdaya Kelautan;		550	700	500	600	700	3.050
b.	Pengembangan sarana dan prasarana pengawasan		750	1.150	1.000	1.500	2.000	6.400
c.	Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan		200	300	350	400	450	1.700
d.	Pembentukan kelompok pokmaswas		105	210				315
e.	Operasional Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan				300	400	500	1.200
f.	Peningkatan kualitas SDM pengawasan		150	200	100	150	200	800
g.	Dukungan manajemen dan administrasi dan dukungan teknis lainnya Ditjen PSDKP		50	100				150
KEGIATAN								
B.	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir		3.911	4.011	1.300	1.650	2.000	12.871

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (JUTA)						TOTAL ALOKASI
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEP. BABEL		3.993	27.272	41.489	43.751	48.568	72.912	226.224
SUB KEGIATAN								
a.	Pelayanan usaha dan pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;		1.261	1.261	250	300	350	3.421
b.	Pembangunan Kedai Pesisir		1.000	1.500				2.500
c.	Pembentukan Kelompok Masy. Pencinta Lingkungan Pesisir		300	400				700
d.	Penyusunan Database dan Informasi Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil		500	-				500
e.	Rehabilitasi Perumahan Nelayan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil							-
f.	Bimbingan Teknis PUMP/KUB Masyarakat Pesisir dan pulau-pulau kecil		150	150				300
g.	Bantuan Alat Teknologi Tepat Guna bagi Industri Rumah Tangga Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.		700	700				1.400
h.	Kawasan pesisir yang di rehabilitasi				1.050	1.350	1.650	4.050
KEGIATAN								
C.	Eksplorasi dan Eksploitasi Sumber Daya Laut		-	-	500	550	700	1.750
SUB KEGIATAN								
a.	Pengelolaan & pengembangan Konservasi & Jenis		1.360	1.720	250	300	350	3.980
b.	Pendayagunaan Pesisir dan lautan		1.191	1.759				2.950
c.	Penyusunan data base dan informasi statistik Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				200	250	300	750
d.	Facilitasi rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut				300	300	400	1.000

Pangkalpinang, Juni 2015
Kepala Dinas
Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kep. Bangka Belitung

Ir. SARJULIANTO, Dipl. SE
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19580710 198603 1 007